



**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES
TERHADAP LAPORAN ASET DESA**

(Studi Kasus BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

NA'ILA SIFAUR ROHMAH

21901082175



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2022**



**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES
TERHADAP LAPORAN ASET DESA**

(Studi Kasus BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

NA'ILA SIFAUR ROHMAH

21901082175



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2022**

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap laporan aset desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan kepala desa, pengelola BUMDES, dan masyarakat. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan triangulasi guna mencapai keabsahan data dari hasil wawancara dan dokumentasinya.

Berdasarkan keseluruhan hasil dari dokumentasi dan wawancara dengan kepala desa, pengelola BUMDES dan masyarakat mengenai transparansi, laporan aset desa, laporan keuangan BUMDES, dan laporan pertanggung jawaban keuangan desa, hasil yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan bahwa indikator untuk mengukur transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDES terhadap laporan aset desa telah sesuai. Oleh karena itu disimpulkan pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap laporan aset desa sudah transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Transparansi, Laporan Keuangan BUMDES, Laporan Aset Desa, LPJ Keuangan Desa

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the process of transparency in the management of BUMDes financial reports on asset reports from Cinandang Village, Dawarblandong District, Mojokerto Regency. The research method used in this study is a qualitative method with primary data sources and secondary data. Data collection techniques through documentation and interviews with village heads, BUMDES managers, and the community. The analytical method in this study uses descriptive and triangulation methods to achieve data validity from interviews and documentation.

Based on the overall results of documentation and interviews with village heads, BUMDES managers and the community regarding transparency, village asset reports, BUMDES financial reports, and village financial accountability reports, the results obtained from this study illustrate that indicators for measuring the transparency of BUMDES financial report management towards the village asset report is appropriate. Therefore it is concluded that the management of BUMDes financial reports on village asset reports is transparent in accordance with statutory regulations.

Keywords: *Transparency, BUMDES Financial Report, Village Asset Report, Village Finance LPJ*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, Desa adalah kelompok masyarakat hukum dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sepanjang batas wilayah berdasarkan prakarsa masyarakat, hak ulayat dan/atau hak tradisional yang diakui, dan sistem kepentingan masyarakat berdasarkan sistem. Pemerintah Republik Indonesia NKRI. Desa memainkan peran penting dalam pembangunan nasional karena memiliki posisi strategis sebagai dasar dalam mengidentifikasi masalah warga dan perencanaan dan pelaksanaan tujuan negara yang ada di taraf desa. Desa pula diberikan wewenang oleh Negara dalam peran partisipasi masyarakat adalah untuk memajukan pembangunan desa, mewujudkan potensi desa melalui pengelolaan desa yang profesional, efektif dan efisien, bertanggung jawab atas kegiatan desa dan menghasilkan keuntungan.

Memberdayakan Suatu komunitas berusaha menarik dirinya dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi diri, mengembangkan potensi diri, dan berusaha untuk lebih mengembangkan potensi yang ada (Kasana, 2015). melalui pemerintah daerah menyampaikan akibat yang sangat baik untuk mengantarkan Indonesia di era keterbukaan yang lebih luas. Pada era otonomi ini membuat wilayah yang ada di Indonesia berlomba-lomba menyebarkan potensi yang terdapat di wilayah masing-masing guna mencapai

kesejahteraan berasal dari wilayah dan rakyat untuk menjadi lebih baik dalam bidang sosial, ekonomi, juga politik. Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan dasar desentralisasi dan mengatur pengelolaan keuangan desa (pasal 72).

Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2015 Dokumen-dokumen tersebut menyangkut pendirian, pengelolaan, pengoperasian dan pembubaran usaha desa dan merupakan pedoman bagi masyarakat dan desa untuk mendirikan dan menjalankan BUMD. BUMDes sebagai entitas ekonomi seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari aset desa.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya ekonomi perusahaan (Purwati, 2016). Menurut Permendagri 1 Tahun 2016, barang milik desa meliputi barang milik desa, tanah adat, pasar desa, pasar hewan, dermaga perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, lelang hasil pertanian, hutan milik desa, dan barang milik desa. satu sumber informasi. . , pemandian umum dan hak milik lainnya. Jenis Aset Desa : Aset Asli Desa, Aset Desa yang Dibeli atau Diperoleh APBD Pengeluaran Desa, Aset Desa Diperoleh Melalui Subsidi, Donasi, dll, Aset Desa, Aset Desa, Aset Desa diperoleh untuk memenuhi perjanjian kontrak. Turunan properti, pembelian koperasi desa, dan akuisisi legal lainnya.

Transparansi adalah jenis layanan publik yang mudah diakses dan terbuka bagi semua orang membutuhkannya. Transparansi juga berarti memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada publik, karena pemerintah memiliki hak

untuk mengetahui bagaimana sumber daya mereka digunakan. Pengelolaan rekening keuangan BUMDes yang efektif dan efisien untuk aset desa juga penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan organisasi. Undang-undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi, 2008-14. Saat itu dikumpulkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip kebebasan, demokrasi, dan pemerintahan. Perlu untuk menjalankan kekuasaan administrasi negara.

Dengan adanya BUMDes ini diharapkan mampu membantu memaksimalkan pemanfaatan kekayaan yang terdapat pada desa. Penggunaan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan peranan BUMDes juga dapat meningkatkan kemajuan, sebagai bentuk peningkatan perekonomian dan kekayaan pada desa. BUMDes dapat menjadi agen pembangunan dan mendorong terciptanya suatu lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perdangan antar pemerintah dan juga memberikan pelayanan pada publik. Pelaporan adalah hal yang paling penting dalam pengelolaan BUMDes. Kami menyadari bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses pembentukan akuntabilitas. Dengan menyampaikan laporan keuangan BUMDes kepada masyarakat, diharapkan informasi pengelolaan BUMDes menjadi transparan dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

BUMDes memerlukan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan organisasi pelapor membantu menilai posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas, pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan. Catatan pelaporan keuangan juga harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. telah ditetapkan.

Tujuan pelaporan keuangan sendiri adalah untuk menyampaikan informasi yang berguna untuk mengambil suatu keputusan akuntabilitas entitas suatu pelaporan.

Iriyani, (2020) dalam penelitiannya tentang “Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha di Kabupaten Kolaka Utara tidak memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.” Selain itu, tahap perencanaan pengelolaan aset desa kurang sesuai dalam proses pencatatannya, Tahap pengadaan pengelolaan aset desa, Tahap penatausahaan pengelolaan aset desa, Tahap pelaporan pengelolaan aset desa, Tahap pertanggungjawaban pengelolaan aset desa dan Tahap pengawasan pengelolaan aset desa. Desa Sawangaoha tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya komunikasi tentang regulasi..

Apriliasari, (2022) dalam penelitiannya tentang “Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa”, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kajian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang pada saat laporan akhir hanya berisi data berupa neraca dan rekening keuangan desa biasanya tidak transparan. Pengelolaan lahan desa tidak memenuhi persyaratan dasar atau memenuhi persyaratan SAK ETAP saat ini di Indonesia. Pihak berelasi mungkin atau mungkin tidak memahami laporan keuangan.

Untuk meningkatkan pendapatan, BUMDes Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa aset kekayaan yang dimiliki oleh desa. **“TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES TERHADAP LAPORAN ASET DESA** (Studi Kasus BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah dan mengembangkan

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes

1. Memahami masalah yang terkait dengan transparansi pengelolaan laporan keuangan pada laporan aset desa.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya transparansi pengelolaan laporan keuangan pada laporan aset desa.

b. Bagi Masyarakat Desa

Untuk mengetahui informasi terkait dengan pelaporan keuangan pada aset yang dimiliki oleh desa.

c. Bagi Pemerintah Desa

1. Sebagai Investor desa karena menggunakan dana desa untuk membentuk BUMDes
2. Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber ekonomi dan kekayaan desa

d. Bagi Pemerintahan ★★★★★★

Sebagai masukan untuk pemerintahan selaku pembuat peraturan hukum

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Fokus penelitian adalah untuk mengevaluasi seberapa transparan pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap laporan aset desa, dan studi kasus ini adalah BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, direktur, bendahara, pengawas, dan masyarakat, serta analisis data yang digunakan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Cinandang sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh BUMDes Cinandang sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
3. Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang disampaikan paling

lambat 3 bulan kepada bupati/walikota melalui camat, dan juga berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas aset yang telah dikelola.

4. Pemerintah Desa Cinandang maupun BUMDes cinandang sudah melakukan transparansi pengelolaan aset desa kepada masyarakat yang dibuktikan dengan telah sesuai indikator transparansi yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin proses.

5.2 Keterbatasan

1. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi dan dokumen secara digital yang BUMDes miliki karena hanya berupa forum untuk mendapatkan informasi tersebut.

5.3 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memilih BUMDes yang menyediakan akses dokumen secara digital untuk mempermudah peneliti mendapatkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. "Psikologi Sosial". Jakarta: Rineka Cipta
- Apriliasari, Karlina. Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa. E-JRA Vol. 11 No. 09 Agustus 2022
- Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Cetakan ketiga. Erlangga: Jakarta
- Burhan, Y. Yuliana. 2020. *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Dana Desa*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, PKDSP Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Bina Menteri Dalam Negeri, Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Buku IV, 2021
- Fitriana, Nurma. 2021. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif Good Corporate Governance*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro
- <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>
- Indiatoro, Dr Nur, M.Sc, Akuntan dan Supomo, Drs. Bambang, M.Si. Akuntan, Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama, Yogyakarta: 2016
- Khasanah, Uswatun. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Wanita Keluarga Sejahtera*. Skripsi. Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Cetakan Ke-empat, CV Andi Offset.
- Nusur, Ahlun. 2021. *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar
- PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Hasil Usaha BUMDes
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pendirian BUMDes
- Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Purwati, Anik. 2016. Menyibak Pelaporan Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010. Skripsi. Universitas Islam Balitar Blitar
- Puspawijaya. Adrian, Ak dan Nuritha Siregar, Julia Dwi, Pengelolaan Keuangan Desa, Pusklatwas BPKP, Edisi Kedua, 2016
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2-3.
- Sudarmiati, N. K. D., Parwati, N. K. A. Y., Hardyanti, P. W., & Ratmadi, K. A. (2019). Penerapan Basis AkruaI Pada Perusahaan BUMDES Dalam Keakuratan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 7(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19962>
- Sujarweni V. Wiratna. 2019. Akuntansi Desa Pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka baru pers: Yogyakarta
- Suharyanto dan Hastowiyono, Seri Buku Pintar BUMDES, Pelembagaan BUM Desa, FPPD, 2014
- Sutaryono, Widuri. Dyah, dan Murtajib, Akhmad, Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta: 2014
- Suwarjono. 2006. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Cetakan kedua. BPFE. Yogyakarta
- Undang-Undang RI No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- Wadiyo, S.E. <https://manajemenkeuangan.net/laporan-keuangan-des/> .Laporan Keuangan Desa: Pengertian, Format dan Cara Membuat, 11 Januari 2022
- Yulianti, M.Si., CPA dan Arum Janie, Dr. Dyah Nirmala, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Transparansi dan Akuntabilitas, CV. Tigamedia Utama, Semarang: 2019